

BANDUNG IN HARMONY

Agus Ahmad Safei



Corpus Pembuka

Bila ada waktu, sesekali, cobalah berdiri sambil berkacak pinggang di ketinggian bukit Dago yang eksotis dan menantang. Lantas, tebarkan pandang menatap panorama alam endah parahyangan di sekeliling. Maka, akan tampaklah rangkaian bukit dan gunung, hijau membiru di kejauhan. Tak putus-putus berjajar mengepung Bandung. Ya, itulah Kota Bandung yang pada penghujung September 2011 ini, tengah merayakan hari kelahirannya yang ke-201.

Hampir dua tahun lalu, sebuah harian terkemuka ibukota memuat sebuah laporan yang amat menarik, di mana Kota Bandung ditempatkan sebagai kota yang menduduki urutan pertama sebagai kota ternyaman dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia, jauh meninggalkan Jakarta dengan segala kemewahannya yang berada di urutan ketujuh. Sementara 24 kota lainnya yang berada di bawah Kota Bandung adalah Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Makassar Palembang, Jakarta, Semarang, Bogor, Medan, Padang, Cirebon, Samarinda, Manado, Tangerang, Jambi, Bekasi, Batam, Balikpapan, Pontianak, Bandar Lampung, Mataram, Pekanbaru, Banjarmasin, Cilegon dan Jayapura.

Dalam survey yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, Mercer, Bandung menjadi kota paling nyaman dengan kualitas hidup terbaik, sedangkan Jayapura berada di urutan ke-25 dan menjadi kota paling tidak nyaman di Indonesia. Riset dan survey Mercer ini mengacu pada perkiraan dan evaluasi dari beberapa faktor penting penentu kualitas hidup, seperti lingkungan politik dan sosial, ekonomi, lingkungan sosial-kultural, medis dan kesehatan, layanan umum dan transportasi, rekreasi, barang-barang kebutuhan, tempat tinggal dan lingkungan alam.

Fenomena Kota Bandung adalah fenomena keragaman etnik, suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan status sosial. Dilihat dari sudut etnik dan kebudayaan, penduduk Kota Bandung merepresentasikan seluruh etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Kota Bandung memang laksana bumi yang mengkerut. Dengan bergumulnya keragaman etnik dalam suatu wilayah yang relatif sempit, sangat dimungkinkan terjadinya sentimen-sentimen bernuansa kesukuan, kedaerahan atau bahkan agama. Sekalipun demikian, di Kota Bandung, para pemeluk agama dan keyakinan yang berlainan relatif dapat hidup berdampingan secara tentram, penuh toleransi dan harmoni.

Tentram dalam Keragaman

Situasi demikian hanya mungkin terjadi kalau di tengah-tengah masyarakat tumbuh kesadaran akan adanya keragaman. Bahwa siapa pun tidak pernah bisa hidup secara sendirian. Sekalipun hampir 90 persen penduduk Kota Bandung beragama Islam, tetapi Islam tidak pernah menghabiskan ruang publik secara sendirian. Menyadari bahwa mereka tidaklah sendirian,

bahwa di luar mereka ada orang lain, ada agama lain, maka, sekalipun mereka mayoritas, di Kota Bandung, Islam tetap lebih memilih untuk berendah hati. Mereka, warga dan pemerintah kotanya, tidak pernah menggembar-gemborkan Islam sebagai satu-satunya panji. Itulah cara beragama yang rendah hati. Islam yang rendah hati adalah Islam yang tidak suka menghegemoni, mengintimidasi, atau mensubordinasi. Ia senang berbagi ruang, dan tak suka mentang-mentang. Dan, umat Islam yang rendah hati, seperti dikatakan oleh Ulil Abshar Abdalla ketika memberikan sambutan pada Perayaan Natal tahun 2010 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf Bandung, bukanlah kaum yang semena-mena dan mengira punya kuasa untuk mengatur Republik ini sendirian. Itulah artikulasi Islam yang rendah hati, yang umatnya punya kesediaan untuk berbagi dan kesadaran akan adanya keragaman.

Tentu saja, tujuan utama pengakuan atas keragaman agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan itu sendiri bukan sekedar melahirkan sikap toleran terhadap orang lain, lebih dari itu adalah suatu upaya proaktif menuju saling memahami. Menerima serta mengakui perbedaan dan keragaman tidak sama dengan mengakui relativisme --apalagi nihilisme. Orang beragama atau beriman yang sejati adalah mereka yang setia atas identitas dan sistem kepercayaannya sendiri, dan pada saat yang sama mempunyai kesediaan untuk memahami dan mengakui keragaman di luar dirinya.

Dalam konteks ini, benar kata sebuah ungkapan, bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Tindakan kekerasan dan intoleransi yang terjadi di masyarakat merupakan akibat matinya toleransi. Padahal, toleransi hadir untuk saling menghargai agar realitas tetap eksis dengan segala warna-warninya. Begitupun eksistensi sebuah masyarakat yang hadir di atas keragaman ras, suku, budaya dan agama. Ia akan semakin kokoh ketika keragaman itu bersinergi dalam rangkaian interaksi untuk saling mengisi dan melengkapi. Harmoni bukan hegemoni yang menafikan kompetisi. Ia justru menjadi ajang bagi terjadinya kontestasi beragam kebaikan (*fastabiq al-khairat*) yang dihadirkan oleh para pemeluk agama yang berbeda.

Mewujudkan fungsi agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dapat dilakukan dengan menghadirkan kesadaran toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan salah satu ukuran maksimal keadaban dan peradaban sebuah bangsa. Semakin toleran sebuah bangsa, tingkat keadaban publik dan peradabannya akan maksimal. Michael Walzer (1994) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful co-existence*) di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan keyakinan, latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Dengan demikian, toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan keyakinan dan keragaman ciptaan Tuhan.

Kesadaran atas adanya keragaman akan membuka jalan bagi umat beragama untuk mengakui keragaman di luar dirinya. Hal itu berarti, seorang pemeluk agama harus melihat orang lain secara apa adanya, menurut sejatinya, sehingga kehidupan ini dipandang sebagai sebuah rajutan kompleks dari berbagai aktor, agen, kepentingan, agama dan kepercayaan, nilai dan ide, yang melaluinya toleransi dan harmoni dapat disulam satu sama lain. Dalam konteks Kota Bandung, kesadaran akan adanya keragaman, khususnya dalam hal keyakinan, diwujudkan dengan diterapkannya sebuah kebijakan yang populer disebut sebagai "Bandung Kota Agamis". Sebagaimana yang berulang kali ditegaskan oleh Walikota Bandung, Dada Rosada, gagasan asali dari program ini adalah bagaimana menjadikan Kota Bandung sebagai 'rumah bersama' yang nyaman, damai, dan tentram bagi semua pemeluk agama.

Tentu saja, hal menarik untuk dicermati lebih jauh adalah penggunaan istilah “agamis” dan bukan istilah lain, misalnya, “Islami”, yang selama ini menjadi kecenderungan dominan yang terjadi di sejumlah daerah. Secara teknis, penggunaan istilah “agamis” dalam salah satu program prioritas Kota Bandung ini dianggap cerdas dan tepat karena akan mampu meminimalisir lahirnya pro-kontra di masyarakat. Dengan istilah ini, pro-kontra tidak lagi menemukan relevansinya karena istilah “agamis” konotasinya cenderung lebih bersifat netral dan bisa diterima oleh semua penganut agama. Dalam konsep Bandung Kota Agamis, semua agama diakui eksistensinya. Dan Islam, sekalipun sebagai agama mayoritas, tampil dengan penuh kerendahan hati.

Berbeda dengan Kota Bandung yang menggunakan istilah “agamis”, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan istilah “Syari’at Islam” dalam program pembangunan daerahnya. Dalam hitungan Robin Bush (2008), saat ini di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 78 Kabupaten dan Kota yang telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama Islam (Perda Syari’ah).

Menyertakan agama sebagai pola acuan dalam berpikir dan bertindak pada wilayah yang lebih luas (masyarakat) dan beragam dari sisi ideologi dan keyakinan, seperti Kota Bandung, bukanlah perkara mudah. Belajar dari Peraturan Daerah (Perda) tentang syariat Islam yang diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda itu telah merosot menjadi sekadar pamflet yang menghiasi jalan-jalan atau papan reklame dan slogan kosong yang sama sekali tidak memiliki gema dan pengaruh mujarab untuk mengubah watak dan tingkah laku masyarakat menjadi lebih bermartabat.

Di panggung sejarah kemanusiaan, agama adalah salah satu magnet yang telah menyedot begitu banyak perhatian. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan tak pernah surut untuk tidak dibicarakan. Sebagai sebuah magnet kehidupan, tak bisa dimungkiri agama pernah mengalami pasang surut. Ada masanya agama menjadi sosok hero yang menyelamatkan kehidupan, tetapi ada masanya pula agama dicaci dan ditahbiskan sebagai biang dari segala kericuhan yang berperan besar dalam sejumlah pertumpahan darah.

Menurut Durkheim (1858-1917), agama merupakan representasi kolektif (*collective representation*) sebuah masyarakat. Baginya, agama merupakan elemen integratif yang berperan menguatkan kohesivitas sosial. Oleh karena itu, ketika terjadi fragmentasi sosial, menguatnya individualitas, dan semakin rapuhnya *sense of community* dalam masyarakat modern, maka peran agama dalam ruang publik pun akan mamudar.

Terlepas dari sejarah kegemilangan agama untuk menyelamatkan masyarakat atau pun sejarah kelamnya yang memberangus kebebasan dan penyokong terorisme, agama tetap menjadi inspirasi dan pusaran hasrat manusia dari masa ke masa. Menurut Thomas F ‘Odea (1983: 34)), hal ini bisa dimengerti karena agama adalah sistem legitimasi yang berbeda dengan sistem legitimasi lainnya. Menurut dia, dalam usaha mewujudkan sistem legitimasinya, agama menggunakan kerangka acuan yang supraempiris. Cita-cita menjadikan Bandung sebagai Kota Agamis terbit dari sebuah keniscayaan bahwa agama dengan seluruh ajarannya adalah sesuatu yang supraempiris. Dan, karena itu, ia diyakini memiliki dasar legitimasi yang kukuh, otentik, dan meyakinkan.

Untuk merealisasikan ”Bandung Kota Agamis”, menurut Suherman (2009), dapat dilakukan melalui pencanangan suatu iklim yang bermartabat melalui *akur jeung dulur nu saagama, teu parasea jeung batur nu beda agama* (toleransi intraumat beragama dan antarumat yang berbeda agama). Bila ini sudah tercapai maka komunitas warga Bandung dapat hidup rukun, *rame gawe* (gotong royong), *tibra sare* (tenang, tidak ada rasa takut).

Corpus Penutup

Dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung mengalami fase pasang terutama dalam sekitar tujuh tahun terakhir, pasca diluncurkannya program “Bandung Kota Agamis” oleh Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Dada Rosada. Sejak kurun 2004 sampai tulisan ini dibuat, intensitas interaksi antarumat beragama mengalami kenaikan yang signifikan. Sekalipun baru berlangsung pada level elit agama di Kota Bandung, interaksi dan komunikasi yang lebih cair dan terbuka semakin sering dilakukan. Program “Bandung Kota Agamis” telah menjadi jalan bagi berlangsungnya suasana interaksi sosial yang lebih terbuka dan dinamis di kalangan tokoh lintas agama. Berbagai momen peringatan hari besar agama, termasuk acara buka puasa bersama, kini telah berubah menjadi media sosial tempat para tokoh lintas agama berkumpul dan berinteraksi. Kelahiran Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) pada 10 Nopember 2007 lalu, telah menjadi pilar sangat penting bagi tumbuhnya suasana kehidupan keagamaan yang lebih toleran dan damai di Kota Bandung.

Boleh jadi, Program “Bandung Kota Agamis” telah menjadi bentuk akomodasi tersendiri yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Bandung terhadap pemeluk agama yang berbeda-beda. Melalui program yang inklusif ini, seluruh umat beragama yang ada di Kota Bandung merasa diayomi, dirangkul dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kemunculan program Bandung Kota Agamis” menunjukkan bahwa untuk mewujudkan toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pihak pemerintah. Lahirnya program “Bandung Kota Agamis” yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandung telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya suasana kehidupan beragama yang lebih dinamis, toleran, terbuka, dan damai. Kohesivitas sosial di antara pemeluk agama yang berbeda di Kota Bandung terjalin lebih baik dengan semakin terbukanya berbagai media komunikasi sosial, yang mewujud dalam bentuk peringatan hari besar keagamaan, yang dapat dihadiri secara bersama-sama oleh umat lintas agama.

Agaknya, hal ini sejalan dengan pandangan Jose Casanova, dalam *Public Religions in Modern World* (1994), yang menyatakan bahwa agama dapat melakukan transformasi sosial di dunia modern. Caranya, menurut Casanova, adalah dengan melakukan deprivatisasi agama, yakni proses di mana agama meninggalkan tempat yang sudah diperuntukkan untuknya, yakni ruang privat, dan memasuki ruang publik guna mengambil peran dan memainkan fungsi kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan modernitas, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi minoritas, dan sebagainya. Dengan demikian, agama muncul tidak hanya menjadi modal spiritual di tengah masyarakat, tetapi menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh program “Bandung Kota Agamis”.

Tampaknya, kehadiran program “Bandung Kota Agamis”, dengan seluruh kekurangan yang dimilikinya, sementara ini relatif merupakan solusi terbaik dalam mengikat keragaman asal-usul, etnis, budaya, dan agama. Setidaknya, upaya ini mampu memperpendek jarak antara satu komunitas dengan komunitas lain, karena mereka memiliki persepsi serupa, bahwa Kota Bandung adalah tempat tinggal bersama yang harus dijaga bersama-sama pula.

Itu pula sebabnya agenda program “Bandung Kota Agamis” adalah bagaimana memantapkan pluralisme bermartabat dengan membuang jauh perbedaan perlakuan antarsesama. Diskriminasi, apa pun bentuknya, adalah kegagalan sosial yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlawanan terhadap tindakan tersebut, tidak selamanya harus dengan kekerasan tetapi melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Sampai batas tertentu, dalam konteks membangun toleransi beragama, kehadiran program “Bandung Kota Agamis” telah menjadi semacam benang homogen atau *common platform* (atau *kalimatun sawa*’ dalam terminologi Islam) yang mengikat berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk berintegrasi secara sosial. Dalam konteks masyarakat beragama, integrasi sosial yang dimaksud mencakup segala proses penyatuan kelompok beragama dalam kapasitas sosialnya (bukan keyakinannya) ke dalam kesatuan sosial lebih dari sikap mengedepankan simbol atau identitas golongan tertentu.

Wallahu’alam.

Agus Ahmad Safei,

*Dosen UIN SGD Bandung,
pernah ”mesantren” di Monash University, Australia
dan Gottingen University, Jerman.*